

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017  
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN  
 PENGAMANAN PADA OBJEK VITAL  
 NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU

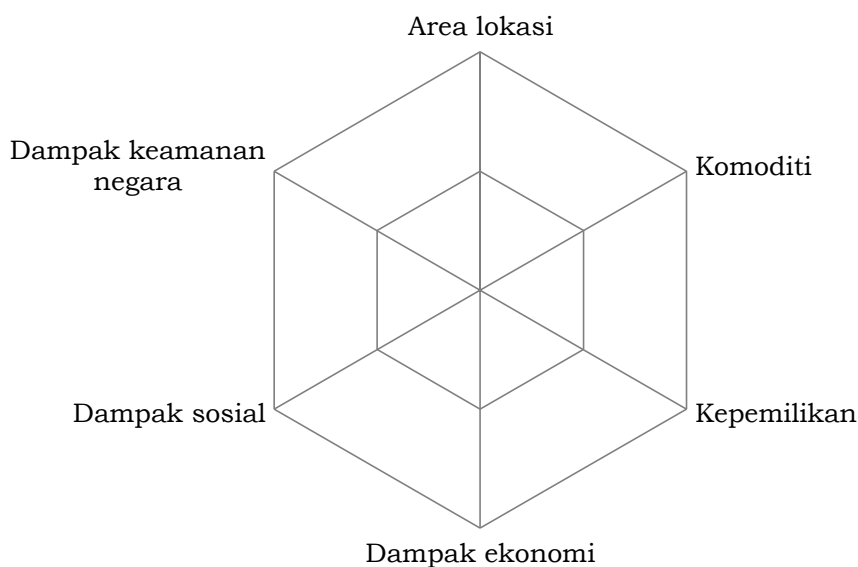
PENILAIAN DAN REKOMENDASI

1. PENILAIAN

Parameter penilaian	Bobot	Hasil Pencapaian Bobot Prinsip	Gap Tiap Prinsip	Tingkat Pencapaian Tiap Prinsip
Area lokasi	10%	.....%	.....%	.....%
Komoditi	15%	.....%	.....%	.....%
Kepemilikan	10%	.....%	.....%	.....%
Dampak ekonomi	20%	.....%	.....%	.....%
Dampak sosial	20%	.....%	.....%	.....%
Dampak keamanan negara	25%	.....%	.....%	.....%
<b>Total Pencapaian</b>	100%	.....%	.....%	.....%

Elemen	Bobot	Hasil Pencapaian Bobot Elemen	Gap Tiap Elemen	Tingkat Pencapaian Tiap Elemen
1. Komitmen dan kebijakan	15%	.....%	.....%	.....%
2. Pola pengamanan	25%	.....%	.....%	.....%
3. Konfigurasi pengamanan	30%	.....%	.....%	.....%
4. Standar kemampuan pelaksana pengamanan	20%	.....%	.....%	.....%
5. Monitoring dan Evaluasi	10%	.....%	.....%	.....%
<b>Total pencapaian</b>	100%	.....%	.....%	.....%

**Pencapaian Tiap Prinsip**



2. REKOMENDASI OBJEK TERTENTU

No	Parameter	Bobot	Hasil Penilaian	Minimal Penilaian
1.	Area lokasi	10%	.....	.....
2.	Komoditi	15%	.....	.....
3.	Kepemilikan	10%	.....	.....
4.	Dampak ekonomi	20%	.....	.....
5.	Dampak sosial	20%	.....	.....
6.	Dampak keamanan negara	25%	.....	.....

- Nama :
- Lokasi :
- SIUP no :
- TDP :
- Status kepemilikan :
- Komposisi kepemilikan :
- Komoditi :
- Cakupan penjualan dan pelayanan :
- Jumlah tenaga kerja :
- Komposisi tenaga kerja : ..... TKA; ..... WNI.
- Nilai investasi :
- Nilai produk :
- Bentuk produk :
- Fasilitas objek usaha atau lembaga negara:

- a. memiliki pelabuhan;
- b. memiliki bandara;
- c. memiliki gudang;
- d. memiliki armada transportasi;
- e. memiliki kantor pusat;
- f. memiliki kantor cabang;
- g. memiliki fasilitas komunikasi mandiri;
- h. memiliki fasilitas pembangkit listrik mandiri; dan
- i. memiliki fasilitas jalan khusus mandiri.

#### STANDAR DAN PENERAPAN SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU

1. Elemen SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, terdiri atas:
  - a. komitmen dan kebijakan, memuat sejumlah 18 kriteria;
  - b. pola pengamanan, memuat sejumlah 49 kriteria;
  - c. konfigurasi pengamanan, memuat sejumlah 31 kriteria;
  - d. standar kemampuan pelaksana pengamanan, memuat sejumlah 10 kriteria; dan
  - e. monitoring dan evaluasi memuat sejumlah 10 kriteria.
2. Penilaian hasil audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilakukan dengan menetapkan bobot pada setiap elemen SMP Obvitnas dan Objek Tertentu pada daftar periksa audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, dengan besaran nilai:
  - a. komitmen dan kebijakan, dengan bobot 15 %;
  - b. pola pengamanan, dengan bobot 25 %;
  - c. konfigurasi pengamanan, dengan bobot 30 %;
  - d. standar kemampuan pelaksana pengamanan, dengan bobot 20 %; dan
  - e. monitoring dan evaluasi, dengan bobot 10 %.

3. Matriks Penilaian SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.

<b>Elemen</b>	<b>Bobot Elemen</b>	<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Pencapaian Nilai Kriteria (0,1,2)</b>	<b>Pencapaian Nilai Elemen</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Komitmen dan kebijakan</b>	<b>15%</b>	1.	Terdapat dokumen kebijakan pengamanan yang bertanggung dan ditandatangani pimpinan puncak organisasi (isi: bentuk, metode, sifat, sasaran dan wilayah pengamanan serta Kodal)	.....	..... %
		2.	Kebijakan pengamanan ditetapkan sesuai dengan perkiraan ancaman didasarkan pada sifat dan skala risiko keamanan.	.....	..... %
		3.	Kebijakan pengamanan bersifat dinamis (hasil evaluasi secara berkala).	.....	..... %
		4.	Kebijakan pengamanan dikomunikasikan kepada pihak internal organisasi (unsur manajemen dan pegawai/karyawan agar sadar dan memiliki tanggung jawab individu di bidang pengamanan organisasi).	.....	..... %
		5.	Kebijakan pengamanan dikomunikasikan kepada pihak eksternal organisasi (agar masyarakat lingkungan sekitar membantu pengamanan organisasi).	.....	..... %
		6.	Penetapan Struktur Organisasi Pengamanan termasuk tanggung jawab dan wewenang yang didokumentasikan, dikomunikasikan dan harus tersedia personel yang cukup dan memadai untuk melaksanakan tugas pengamanan.	.....	..... %
		7.	Terdapat penunjukan manajemen khusus yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk menerapkan SMP.	.....	..... %
		8.	Terdapat penetapan pendokumentasian dan pengomunikasian penyelenggaraan tata kelola pengamanan dan tugas pengamanan organisasi.	.....	..... %

1	2	3	4	5	6
		9.	Sumber daya dan infrastruktur terinventarisasi guna menunjang penerapan SMP.	.....	..... %
		10.	Terdapat alokasi anggaran dan/atau biaya pengamanan guna menunjang penerapan SMP.	.....	..... %
		11.	Terdapat ketentuan untuk melaksanakan audit SMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	.....	..... %
		12.	Terdapat penyelenggaraan audit SMP yang dilaksanakan secara berkala oleh auditor internal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	.....	..... %
		13.	Terdapat auditor internal yang memiliki kompetensi bidang SMP sesuai peraturan perundang-undangan.	.....	..... %
		14.	Terdapat catatan hasil audit SMP dan tindak lanjutnya guna memberikan umpan balik untuk semua pihak yang terkait.	.....	..... %
		15.	Terdapat penetapan mekanisme pelaksanaan tinjauan manajemen tentang penerapan SMP, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan terdokumentasikan.	.....	..... %
		16.	Terdapat bukti kehadiran pimpinan puncak dalam pelaksanaan rapat tinjauan manajemen SMP.	.....	..... %
		17.	Terdapat catatan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut tinjauan manajemen SMP yang disahkan oleh pimpinan puncak Obvitnas dan objek tertentu.	.....	..... %
		18.	Terdapat catatan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut tinjauan manajemen SMP yang disahkan oleh pimpinan puncak Obvitnas dan objek tertentu.	.....	..... %
			<b>Subtotal</b>	.....	..... %

1	2	3	4	5	6
<b>Pola Pengamanan</b>	<b>25%</b>		<b>A. BENTUK PENGAMANAN</b>		
		1.	Terdapat dokumen kerangka kerja dan panduan praktis dalam melaksanakan manajemen risiko pengamanan.	.....	..... %
		2.	Terdapat analisis risiko pengamanan dalam bentuk catatan tabel hasil penilaian yang dibuat oleh perusahaan/Pam internal (identifikasi aset organisasi, penilaian dan penetapan ancaman/gangguan, penetapan risiko kerugian, peluang kejadian dan penetapan tingkat risiko pengamanan).	.....	..... %
		3.	Hasil manajemen risiko pengamanan dikerjakan oleh personel yang memiliki kompetensi yang relevan.	.....	..... %
		4.	Terdapat penetapan pilihan mitigasi risiko pengamanan untuk setiap fungsi di organisasi untuk mengurangi risiko kejadian.	.....	..... %
		5.	Terdapat penetapan sumber data dan informasi sebagai dasar dalam penilaian risiko pengamanan organisasi.	.....	..... %
		6.	Terdapat penilaian ulang ( <i>re-assesment</i> ) risiko pengamanan.	.....	..... %
		7.	Penetapan dan pelaksanaan pengamanan langsung dalam bentuk pengerahan dan penggelaran kekuatan beserta sarana prasarana pengamanan sesuai kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan Kamtibmas yang mungkin terjadi.	.....	..... %
		8.	Penetapan dan pelaksanaan pengamanan tidak langsung dalam bentuk pemantauan, pengawasan dan penerimaan laporan dari pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu.	.....	..... %
		9.	Terdapat penetapan pengendalian operasional pengamanan langsung dan tidak langsung terhadap objek pengamanan.	.....	..... %
		10.	Pengukuran efektivitas pelaksanaan bentuk pengamanan.	.....	..... %
		<b>Subtotal</b>	.....	..... %	

1	2	3	4	5	6
			<b>B. SIFAT PENGAMANAN</b>		
		1.	Penetapan sifat pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan analisis risiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan.	.....	..... %
		2.	Pengeralahan dan penempatan personel pengamanan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan.	.....	..... %
		3.	Pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan cara bertindak yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen kebijakan pengamanan.	.....	..... %
		4.	Pengendalian operasional pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup.	.....	..... %
		5.	Terdapat infrastruktur/fasilitas dan alat bantu pengamanan yang digunakan dalam pengamanan terbuka dan tertutup yang dipastikan dalam kondisi layak pakai.	.....	..... %
		6.	Terdapat pembagian zona sesuai dengan hasil analisis risiko pengamanan (zona bebas, zona terbatas dan zona terlarang)	.....	..... %
		7.	Terdapat catatan/rekaman kegiatan pengendalian operasional pengamanan tempat kerja, infrastruktur dan fasilitas organisasi.	.....	..... %
		8.	Terdapat bukti penerapan pengendalian operasional pengamanan terbuka dengan memberikan tanda pengenal terhadap karyawan, mitra kerja, pengunjung, termasuk barang dan kendaraan.	.....	..... %
		9.	Terdapat bukti penerapan pengendalian pengamanan terbuka dan tertutup terhadap pengadaan, distribusi, penerimaan dan penyimpanan barang dan jasa.	.....	..... %
		10.	Terdapat bukti evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pengamanan oleh internal yang ditempatkan oleh BUJP atau pengguna jasa pengamanan dan/atau oleh jasa pengamanan yang ditugaskan oleh Polri.	.....	..... %

1	2	3	4	5	6
		11.	Pengukuran efektivitas pelaksanaan pengamanan terbuka atau tertutup dalam bentuk laporan Anev.	.....	..... %
			<b>Subtotal</b>	.....	..... %
			<b>C. SASARAN PENGAMANAN (Manusia, Barang, Tempat, Dokumen dan Kegiatan)</b>		
		1.	Penetapan sasaran pengamanan telah sesuai dengan identifikasi potensi kerawanan terhadap manusia, barang, fasilitas, dokumen/informasi, tempat dan kegiatan yang dibuat dalam bentuk tertulis.	.....	..... %
		2.	Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya organisasi yang meliputi manusia, sarana prasarana dan anggaran untuk mendukung sasaran pengamanan.	.....	..... %
		3.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung sasaran pengamanan berdasarkan standardisasi peralatan dan perlengkapan yang telah ditetapkan.	.....	..... %
		4.	Penetapan sasaran pengamanan harus terukur dengan indikator yang jelas untuk setiap sasaran pengamanan.	.....	..... %
		5.	Terdapat pernyataan terdokumentasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara tujuan dan sasaran pengamanan di setiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi.	.....	..... %
		6.	Penetapan sasaran pengamanan harus selaras dengan kebijakan pengamanan, termasuk komitmen untuk mencegah terjadinya ancaman, memenuhi persyaratan perundangan dan perbaikan berkelanjutan.	.....	..... %
		7.	Terdapat penunjukan penanggung jawab dalam penetapan dan evaluasi di setiap fungsi yang relevan pada tingkatan organisasi dalam bentuk program pengamanan untuk mencapai sasaran pengamanan.	.....	..... %



1	2	3	4	5	6
		8.	Pelaksanaan program pengamanan harus dipantau, ditinjau, dicatat secara berkala dan terencana terhadap pencapaian sasaran pengamanan.	.....	..... %
		9.	Penetapan program pengamanan yang terdokumentasi harus menetapkan target waktu pencapaiannya.	.....	..... %
		10.	Sasaran pengamanan yang ditetapkan organisasi harus dapat dilaksanakan atau organisasi memiliki kemampuan untuk mencapainya.	.....	..... %
		11.	Terdapat tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian risiko pengamanan dan mitigasi risikonya dalam bentuk dokumen program pengamanan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengamanan yang berisi strategi pengembangan kegiatan pengamanan.	.....	..... %
		12.	Terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian dokumen SMP organisasi.	.....	..... %
		13.	Terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian catatan kegiatan operasional aspek pengamanan organisasi.	.....	..... %
		14.	Terdapat pemastian bahwa dokumen yang digunakan tersedia dalam versi relevan dengan penggunaannya untuk mencegah penggunaan dokumen yang usang.	.....	..... %
		15.	Terdapat pemastian bahwa setiap dokumen memiliki status yang teridentifikasi (klasifikasi dokumen) termasuk perubahan dan revisi terbaru.	.....	..... %
		16.	Terdapat pemastian dokumen eksternal yang dibutuhkan telah diidentifikasi dan dikendalikan.	.....	..... %
		17.	Terdapat catatan prosedur SMP dan pemastian distribusi catatan prosedurnya.	.....	..... %
			<b>Subtotal</b>	.....	..... %

1	2	3	4	5	6
			<b>D. AREA PENGAMANAN</b>		
		1.	Terdapat penetapan area pengamanan berdasarkan analisis risiko pengamanan yang dibagi menjadi zona sesuai dengan kebutuhan (zona bebas, zona terbatas, zona terlarang).	.....	..... %
		2.	Terdapat area pengamanan dalam kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu antara lain: a. lokasi produksi; b. perkantoran; c. pergudangan; d. perparkiran; dan e. instalasi penting.	.....	..... %
		3.	Terdapat area pengamanan di dalam dan di luar kawasan Obvitnas atau Objek Tertentu, meliputi: a. batas bangunan dengan pagar terluar atau batas dalam penguasaan pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu; b. pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW; dan c. penggunaan simbol atau tanda batas bagi Obvitnas dan Obyek Tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar.	.....	..... %
		4.	Lingkungan sekitar di luar kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu berupa pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau kecamatan/kabupaten atau lintas provinsi.	.....	..... %
			<b>Subtotal</b>	.....	..... %

1	2	3	4	5	6
			<b>E. KODAL</b>		
		1.	Penetapan mekanisme Komando dan Pengendalian (Kodal) dalam kondisi normal berada pada pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu.	.....	..... %
		2.	Terdapat analisis keadaan darurat yang dibuat oleh pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu.	.....	..... %
		3.	Penetapan mekanisme kodal dalam kondisi kontingensi berada pada Polri dan/atau dapat meminta bantuan TNI.	.....	..... %
		4.	Terdapat kegiatan simulasi tanggap darurat dalam kondisi kontingensi terhadap mekanisme kodal yang telah ditetapkan oleh pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu.	.....	..... %
		5.	Terdapat kegiatan pengukuran efektivitas kinerja mekanisme kodal, baik dalam kondisi normal maupun kontingensi.	.....	..... %
		6.	Terdapat kegiatan partisipasi, konsultasi dan komunikasi dalam mekanisme kodal dengan pihak internal (seluruh tingkatan dan fungsi yang ada) dan eksternal dalam rangka penerapan SMP.	.....	..... %
		7.	Terdapat penetapan personel di setiap fungsi yang relevan di organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan penanganan dan pemulihan keadaan darurat keamanan.	.....	..... %
			<b>Subtotal</b>	.....	..... %

1	2	3	4	5	6
<b>Konfigurasi Pengamanan</b>	<b>30%</b>		<b>A. KOMPONEN STANDAR PENGAMANAN (Manusia dan Infrastruktur)</b>		
		1.	Terdapat penunjukkan perwakilan manajemen dan perangkatnya oleh pimpinan puncak untuk menerapkan SMP.	.....	..... %
		2.	Terdapat penetapan struktur organisasi pengamanan yang didokumentasikan dengan personel pengamanan yang cukup.	.....	..... %
		3.	Penetapan, pendokumentasian dan pengomunikasian tanggung jawab dan wewenang dari seluruh personel pengamanan.	.....	..... %
		4.	Terdapat sarana prasarana yang terinventarisasi dalam menunjang penerapan SMP (pagar, pintu gerbang, penerangan ( <i>lighting</i> ), pintu darurat, pos keamanan, pos jaga, P3K, sistem alarm, metal detektor, CCTV, alat komunikasi, pusat komando, dan lain-lain).	.....	..... %
		5.	Terdapat daftar rekapitulasi dan dokumen ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan yang tetap terpelihara dan terjaga dengan baik serta termutakhir (pengaturan turjawali, pemeriksaan terhadap badan, barang dan kendaraan yang keluar masuk, penanganan aksi unjuk rasa, penanganan ancaman/teror bom, penanganan bencana alam, dan lain-lain).	.....	..... %
		6.	Terdapat bukti/catatan evaluasi secara periodik terhadap prosedur/instruksi kerja pengendalian operasional pengamanan untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.	.....	..... %
		7.	Terdapat prosedur penetapan klasifikasi dokumen/informasi organisasi sesuai tingkat kerahasiaannya yang terdokumentasi.	.....	..... %
		8.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, menyusun dan memelihara peraturan perundang-undangan dibidang keamanan yang terdapat dalam organisasi.	.....	..... %
		9.	Terdapat bukti kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dibidang keamanan dan peraturan lainnya yang relevan.	.....	..... %

1	2	3	4	5	6
		10.	Terdapat prosedur tentang penyusunan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko pengamanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengamanan.	.....	..... %
		11.	Terdapat prosedur tentang penyusunan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko pengamanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengamanan.	.....	..... %
		12.	Terdapat prosedur tentang koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan keadaan darurat pada situasi kontingensi.	.....	..... %
		13.	Terdapat prosedur penanganan ancaman terorisme.	.....	..... %
		14.	Terdapat prosedur penanganan keamanan dan sistem informasi.	.....	..... %
		15.	Terdapat prosedur penetapan level keamanan sesuai identifikasi tingkat ancaman (aman, rawan, kontingensi).	.....	..... %
			<b>Subtotal</b>	.....	..... %
			<b>B. PENETAPAN DAN PEMBINAAN AREA PENGAMANAN</b>		
		1.	Terdapat penetapan area pengamanan dalam kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu.	.....	..... %
		2.	Penataan tata ruang area pengamanan sesuai dengan poin 1 ditetapkan dengan klasifikasi zona 1 (warna merah) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area.	.....	..... %
		3.	Terdapat penetapan area pengamanan di dalam dan di luar kawasan Obvitnas atau Objek Tertentu, meliputi: a. batas bangunan dengan pagar terluar atau batas dalam penguasaan pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu; b. pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW; dan c. penggunaan simbol atau tanda batas bagi Obvitnas dan Objek Tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar.	.....	..... %

1	2	3	4	5	6
		4.	Penataan area pengamanan sesuai dengan poin 3 ditetapkan dengan klasifikasi zona 2 (warna kuning) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area.	.....	..... %
		5.	Lingkungan sekitar di luar kawasan obvitnas dan objek tertentu berupa: pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau kecamatan/kabupaten atau lintas provinsi.	.....	..... %
		6.	Penataan area pengamanan sesuai dengan poin 5 ditetapkan dengan klasifikasi zona 3 (warna hijau) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area.	.....	..... %
		7.	Terdapat pengklasifikasian area pengamanan dalam bentuk pembatas ( <i>barrier</i> ) secara fisik atau simbol.	.....	..... %
		8.	Terdapat bukti penetapan dan pengendalian klasifikasi area pengamanan sesuai dengan hasil penilaian risiko pengamanan.	.....	..... %
		9.	Terdapat pembinaan dan pengawasan terhadap area pengamanan.	.....	..... %
			<b>Subtotal</b>	.....	..... %
			<b>C. KONSEP UMUM PENGAMANAN (Rencana Desain Pengamanan, Strategi yang diambil, Jangka Waktu yang diperlukan, Anggaran, Renpam Situasi Darurat/Kontingensi)</b>		
		1.	Terdapat bukti terdokumentasi berupa dokumen rencana pengamanan kontingensi dan rencana pengamanan kegiatan masing-masing fungsi/departemen/bagian tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan secara ringkas dan jelas terhadap potensi ancaman, sasaran, sumber daya dukung dan strategi pencapaiannya (konsep pengamanan, target pengamanan, dan cara bertindak) selama periode atau waktu tertentu.	.....	..... %

1	2	3	4	5	6	
		2.	Terdapat perencanaan pengamanan kontingensi, berisi kebijakan dan kewenangan secara tertulis tentang keadaan darurat (kontingensi) serta perintah untuk menutup atau menghentikan operasional perusahaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.	.....	..... %	
		3.	Terdapat penyelenggaraan manajemen keamanan pada masing-masing fungsi/departemen/bagian sesuai dengan dokumen rencana pengamanannya.	.....	..... %	
		4.	Terdapat evaluasi penyelenggaraan manajemen keamanan masing-masing fungsi/departemen/bagian secara berkala paling sedikit 2 kali dalam setahun.	.....	..... %	
		<b>Subtotal</b>				
		<b>D. KEKUATAN JUMLAH PERSONEL PENGAMANAN</b>				
		1.	Terdapat catatan yang terdokumentasi tentang jumlah personel pengamanan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada pertimbangan: a. identifikasi luas menyangkut jumlah area Obvitnas dan Objek Tertentu yang diamankan; dan b. tingkat ancaman dan risiko terhadap kelangsungan Obvitnas dan Objek Tertentu.	.....	..... %	
		2.	Terdapat kekuatan jumlah personel pengamanan internal yang cukup terdiri atas beberapa regu yang dibagi dalam <i>shift</i> dengan pola 3 <i>shift</i> 2 bagian dalam waktu 8 jam atau 2 <i>shift</i> 2 bagian dalam waktu 12 jam.	.....	..... %	
		3.	Terdapat kekuatan jumlah personel pengamanan oleh Polri yang disesuaikan dengan kontrak kerjasama.	.....	..... %	
		<b>Subtotal</b>			.....	..... %

1	2	3	4	5	6
<b>Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan</b>	<b>20%</b>		<b>A. STANDAR KEMAMPUAN PERSONEL PENGAMANAN INTERNAL</b>		
		1.	Terdapat pembinaan teknis terhadap kemampuan personel pengamanan internal yang dilakukan baik oleh pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu maupun oleh Polri.	.....	..... %
		2.	Terdapat program pelatihan kemampuan anggota pengamanan internal yang dilaksanakan oleh Polri, pengguna jasa pengamanan atau BUJP dalam bentuk: a. pelatihan dasar dengan kualifikasi Gada Pratama; b. pelatihan menengah dengan kualifikasi Gada Madya; c. pelatihan manajerial dengan kualifikasi Gada Utama; dan d. kursus spesialisasi.	.....	..... %
		3.	Terdapat catatan hasil analisis dan evaluasi efektivitas pelaksanaan program pelatihan dan/atau efektivitas hasil pelatihan terkait aspek kompetensi pengamanan.	.....	..... %
		4.	Terdapat personel pengamanan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	.....	..... %
		5.	Terdapat prosedur tentang pengelolaan pelatihan personel pengamanan internal terkait aspek kompetensi pengamanan.	.....	..... %
		6.	Terdapat catatan hasil identifikasi dan proses analisis kebutuhan pelatihan kompetensi pengamanan yang sesuai dengan risiko pengamanan dan sistem manajemen pengamanan.	.....	..... %
		7.	Terdapat prosedur tentang membangun kesadaran pengamanan terhadap setiap personel, karyawan atau mitra kerja pada perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja pengamanan.	.....	..... %
			<b>Subtotal</b>	.....	..... %



1	2	3	4	5	6
			<b>B. STANDAR KEMAMPUAN ANGGOTA POLRI</b>		
		1.	Terdapat kualifikasi anggota Polri dalam pelaksanaan pengamanan berupa kemampuan tugas Polisi Umum.	.....	..... %
		2.	Terdapat kemampuan fisik anggota Polri yang sehat jasmani dan rohani.	.....	..... %
		3.	Terdapat rekam jejak perilaku anggota Polri yang baik untuk ditugaskan dalam pengamanan.	.....	..... %
			<b>Subtotal</b>	.....	..... %
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>10 %</b>	1.	Terdapat prosedur dan mekanisme pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan kinerja pengamanan baik pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai kebutuhan organisasi, efektivitas pengendalian pengamanan, dan evaluasi pematuhan peraturan perundangan aspek keamanan.	.....	..... %
		2.	Organisasi harus mengidentifikasi parameter kinerja dari pengamanan secara menyeluruh untuk organisasi terkait kebijakan dan sasaran, program pengamanan, umpan balik dari kelemahan sistem, dan kegiatan pelatihan atau kegiatan membangun kesadaran pengamanan.	.....	..... %
		3.	Terdapat catatan hasil pemantauan pelaksanaan perencanaan dan program SMP yang telah ditetapkan.	.....	..... %
		4.	Terdapat prosedur pemeliharaan dan kalibrasi yang terdokumentasi untuk peralatan yang dipersyaratkan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran.	.....	..... %
		5.	Terdapat catatan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dipersyaratkan.	.....	..... %
		6.	Terdapat catatan hasil pemantauan dan pengukuran ketidaksesuaian serta tindak lanjutnya.	.....	..... %

1	2	3	4	5	6
		7.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan internal terkait semua hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran, audit dan tinjauan ulang SMP.	.....	..... %
		8.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan eksternal yang dipersyaratkan terkait aspek keamanan	.....	..... %
		9.	Terdapat catatan bukti pelaporan internal dan eksternal pelaksanaan SMP organisasi.	.....	..... %
		10.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi tentang penanganan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahannya.	.....	..... %
			<b>Subtotal</b>	.....	..... %

4. Penilaian audit SMP Obvitnas dan Objek tertentu.
  - a. parameter penilaian setiap kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP ditetapkan dengan skor nilai angka 0, 1 dan 2.
  - b. skor nilai angka 0, 1 dan 2 dengan penjelasan:
    - 1) skor nilai angka 0 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP tidak dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
    - 2) skor nilai angka 1 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
    - 3) skor nilai angka 2 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
  - c. penetapan skor nilai 0, 1 dan 2, berlaku untuk penilaian seluruh kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

